KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JCIMPRKY

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS	PENERIMA PENGHASII	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP	: 1552	96677	2 2 0 0 0				
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	: CITRALIA JAN	UARTY	·				
B. PPh PASA	L 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAI (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	986.300	986.300	0	5	49.315	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 3 dd D 2 mm Z 0 Z 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0				
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subu	nit Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI	HARI JUMADI				
C.6 Pernyata	aan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	c mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	